

Santri in the State: The Architecture of the NU Party Coalition at the End of the Soekarno Era 1952-1966

Mahmud^{a*}

^aUniversitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

[*mahmudmahmud@unesa.ac.id](mailto:mahmudmahmud@unesa.ac.id)

Abstract

This article examines the coalitional architecture of the Nahdlatul Ulama (NU) Party during 1952–1966 as a deliberate strategy to safeguard *santri* interests within the state, rather than a mere act of accommodation or resistance to the regime. Beginning with the 1952 Palembang Congress—when NU withdrew from Masyumi and established its own political party—this study maps two axes of coalition: the horizontal (cross-party and cross-ideological alliances, from the 1950s cabinets to limited accommodation within the Nasakom scheme) and the vertical (the governance of the *Syuriah-Tanfidziyah* structure and autonomous bodies that mediated between *syar'iyyah* rationality and *siyasiyyah* calculation). Employing a historical–qualitative approach (heuristics, source criticism, interpretation, historiography) complemented by light quantitative mapping (coalition timelines, cabinet participation frequency, distribution of political offices), the data are drawn from congress proceedings, organizational decrees, elite speeches and memoirs, contemporary press archives, and selected interviews. The key findings reveal that (1) religious legitimacy grounded in *fiqh siyasah* and the doctrine of *waliyyul amri ad-daruri bisy-syaukah* served as the normative foundation of NU's coalition; (2) the strategic use of executive–legislative positions—especially the Ministry of Religious Affairs—converted *pesantren* cultural authority into policy leverage; and (3) internal correction mechanisms between senior *ulama* and younger elites functioned as an ideological safeguard, particularly amid rising tensions with the PKI before and after 1965. The study's contribution lies in conceptualizing a model of “coalitional architecture” that integrates structure–process–discourse as an analytical lens to interpret the Islam–state relationship at the end of the Sukarno era, and to explain why NU's political choices appeared ambivalent yet consistently aimed to preserve policy access while minimizing political costs for the *pesantren* base.

Keywords: NU Party, Coalitional Architecture, Waliyyul Amri, Santri-State Relations

Santri dalam Negara: Arsitektur Koalisi Partai NU pada Akhir Era Soekarno Tahun 1952-1966

Abstrak

Artikel ini menelaah arsitektur koalisi Partai Nahdlatul Ulama (NU) pada 1952–1966 sebagai strategi sadar untuk mengamankan kepentingan santri di dalam negara, alih-alih sekadar sebagai akomodasi atau resistensi terhadap rezim. Berangkat dari simpul Palembang 1952—keluarnya NU dari Masyumi dan lahirnya Partai NU—kajian memetakan dua sumbu koalisi: horizontal (aliansi lintas partai/ideologi, dari kabinet 1950-an hingga akomodasi terbatas pada skema Nasakom) dan vertikal (tata kelola Syuriah-Tanfidziyah serta badan otonom yang memediasi rasionalitas *syar'iyyah* dan kalkulasi *siyasiyyah*). Dengan pendekatan historis-kualitatif (heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi) yang ditopang pemetaan kuantitatif ringan (garis waktu koalisi, frekuensi partisipasi kabinet, sebaran

jabatan), data dihimpun dari risalah muktamar, keputusan organisasi, pidato/memoar elite, arsip pers sezaman, serta wawancara terbatas. Temuan kunci menunjukkan bahwa (1) legitimasi keagamaan berbasis fiqh siyasah dan doktrin waliyyul amri ad-daruri bisy-syaukah menjadi fondasi normatif koalisi; (2) instrumentasi jabatan eksekutif-legislatif—khususnya Kementerian Agama—mengonversi otoritas kultural pesantren menjadi leverage kebijakan; dan (3) mekanisme koreksi internal antara ulama sepuh dan elite muda berfungsi sebagai alarm terhadap deviasi ideologis, terutama pada fase ketegangan dengan PKI menjelang dan sesudah 1965. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan model “arsitektur koalisi” yang menyatukan struktur-proses-wacana sebagai lensa analitis untuk memahami relasi Islam-negara pada akhir era Soekarno serta menawarkan penjelasan mengapa pilihan NU tampak ambivalen namun konsisten dalam merawat akses kebijakan sekaligus meminimalkan biaya politik bagi basis pesantren.

Kata Kunci: Partai NU, Absitektur Koalisi, Waliyyul Amri, Santri-Negara

Pendahuluan

Pemekaran Nahdlatul Ulama (NU) menjadi partai politik pada 1952 menandai babak baru keterlibatan santri dalam pengelolaan negara (Noer, 1987; Fealy & Barton, 1996). Keputusan menarik diri dari Masyumi melalui Muktamar XIX Palembang, 30 April 1952—setelah rangkaian ketegangan pasca-Kongres Masyumi 1949 dan jatuhnya Kabinet Sukiman pada 25 Februari 1952—lahirkan Partai NU sebagai aktor yang berdaulat dalam arena koalisi, kabinet, dan parlementarisme akhir Demokrasi Liberal hingga menuju Demokrasi Terpimpin (Feith, 1962/2007; Boland, 1971). Momentum ini bukan sekadar perpindahan kendaraan politik; ia mengubah konfigurasi representasi santri dari “anggota istimewa” menjadi perancang koalisi dengan preferensi kebijakan keagamaan, pendidikan, dan sosial yang spesifik pesantren (Bruinessen, 1994; Ricklefs, 2008).

Sejak itu, arsitektur koalisi Partai NU dibangun di dua sumbu. Pertama, sumbu horizontal—yakni praktik koalisi lintas partai dan lintas ideologi—yang tampak pada partisipasi NU dalam kabinet-kabinet paruh awal 1950-an hingga akomodasi terhadap konsepsi Nasakom pada awal 1960-an (Feith, 1962/2007; Lev, 1966). Kedua, sumbu vertikal—yakni tata kelola internal Syuriah-Tanfidziyah dan jejaring badan otonom—yang memungkinkan bargaining serentak antara tuntutan ideologis-keagamaan dan kebutuhan elektoral-pragmatis (Fealy & Barton, 1996; Bush, 2015). Dalam fase transisi 1965–1966, misalnya, dinamika elite muda NU (Subchan dkk.) berinteraksi dengan keputusan Syuriah/Tanfidziyah, menunjukkan bagaimana struktur internal dipakai untuk memodulasi sikap koalisi di tingkat negara (Bruinessen, 1994; van Klinken, 2007).

Di penghujung kekuasaan Soekarno, konfigurasi itu makin kompleks: di satu sisi, konsistensi dukungan sebagian kiai terhadap Soekarno dimaknai sebagai strategi menjaga stabilitas dan akses kebijakan; di sisi lain, arus koreksi dari generasi muda mendorong redefinisi batas koalisi ketika kedekatan rezim dengan PKI dianggap menekan ruang aspirasi Islam politik (Boland, 1971; Ricklefs, 2008). Ketegangan kreatif ini memengaruhi keputusan-keputusan strategis menjelang dan sesudah 1965, termasuk reposisi figur-figur kunci, pembagian peran di badan-badan otonom, dan pengaturan narasi resmi partai terhadap krisis nasional (Feith, 1962/2007; Sundhaussen, 1982).

Meski demikian, beban literatur yang ada cenderung memusat pada dua poros besar: (1) NU sebagai “variabel dependen” dari politik negara—menekankan kontrol dan intervensi rezim; atau (2) NU sebagai “aktor resistensi”—menyorot oposisi terbuka maupun terselubung (Bruinessen, 1994; Hefner, 2000). Kajian ini menawarkan pergeseran perspektif: NU sebagai arsitek koalisi yang secara sadar merangkai aliansi, distribusi jabatan, serta agenda kebijakan untuk memastikan kelangsungan kepentingan santri dalam negara—baik melalui patronase kabinet, front lintas ormas (mis. federasi keislaman), maupun penataan lini internal Syuriah-Tanfidziyah (Fealy & Barton, 1996; Bush, 2015). Dengan kerangka ini, keterlibatan NU pada masa akhir Soekarno tidak direduksi menjadi “akomodasi” atau “perlawanan” semata, tetapi rekayasa koalisi yang bersifat situasional dan berjenjang (Ricklefs, 2008).

Secara empiris, periode 1952–1966 memperlihatkan tiga lokus arsitektur koalisi. Pertama, kelahiran Partai NU pasca-Palembang 1952 yang memaksa redesain kanal negosiasi santri—from forum antarormas menuju meja koalisi antarpatai (Noer, 1987; Fealy & Barton, 1996). Kedua, keterlibatan dalam kabinet yang memberi leverage kebijakan sekaligus menuntut kompromi ideologis (Feith, 1962/2007). Ketiga, fase krisis 1965–1966 saat partai menata ulang posisi dalam turbulensi politik, termasuk pernyataan sikap atas G30S dan pengaturan komando politik di Jakarta (Ricklefs, 2008; Sundhaussen, 1982). Ketiganya menegaskan rasionalitas koalisi NU: menjaga akses negara sembari meminimalkan biaya politik bagi basis pesantren (Bruinessen, 1994; Bush, 2015).

Dari sisi kebaruan, artikel ini: (a) memetakan “arsitektur” koalisi NU—aktor, forum, dan instrumen—alih-alih hanya menilai hasil kebijakan; (b) menautkan struktur internal (Syuriah-Tanfidziyah, badan otonom, figur kunci) dengan strategi eksternal (koalisi kabinet, front politik, Nasakom); dan (c) menunjukkan mekanisme brokerage santri dalam merawat legitimasi religius sekaligus daya tawar negara (Fealy & Barton, 1996; Bush, 2015). Pendekatan ini memperkaya gambaran relasi Islam–negara pada akhir era Soekarno dan menjelaskan mengapa pilihan koalisi NU kerap tampak ambivalen namun konsisten menjaga kelangsungan representasi santri (Ricklefs, 2008).

Secara metodologis, penelitian menggunakan pendekatan historis-kualitatif dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi; sumber meliputi arsip organisasi, pemberitaan sezaman, memoar/pidato elite, serta studi terdahulu yang relevan (Gottschalk, 1969; Howell & Prevenier, 2001). Fokus temporal dibatasi 1952–1966 untuk menangkap transformasi dari kelahiran Partai NU hingga transisi kekuasaan 1966. Pembacaan silang antara dokumen internal NU, risalah muktamar, dan rekonstruksi peristiwa dimaksudkan untuk menalar pilihan koalisi sebagai strategi rasional dalam konteks kompetisi multiaktor dan tekanan negara (Feith, 1962/2007; Noer, 1987).

Bertolak dari latar tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan penelitian: (1) bagaimana arsitektur koalisi Partai NU dirancang dan dijalankan pada 1952–1966 (aktor, forum, instrumen, dan taktikalnya)?; (2) sejauh mana arsitektur itu mengamankan kepentingan santri sekaligus merawat akses kebijakan di tengah menguatnya konsolidasi kekuasaan eksekutif dan fragmentasi partai-partai? Jawaban atas pertanyaan ini diharapkan memberi kontribusi teoritik bagi diskursus relasi Islam–negara dan studi koalisi partai berbasis

agama, serta kontribusi empirik bagi penulisan sejarah politik NU pada fase ujung kekuasaan Soekarno (Fealy & Barton, 1996; Bush, 2015).

Secara sistematika, setelah pendahuluan, bagian kedua mengulas latar sejarah dan infrastruktur politik NU pasca-1952; bagian ketiga memetakan mekanisme koalisi (horizontal–vertikal) beserta studi kasus kabinet dan forum lintas ormas; bagian keempat mengkaji titik kritis 1965–1966 dan implikasinya bagi penataan ulang arsitektur koalisi; bagian penutup merumuskan temuan kunci dan implikasi riset lanjutan (Ricklefs, 2008).

Metode

Penelitian ini mempunyai batasan waktu 1952-1966 dengan menempatkan Palembang, 30 April 1952, sebagai simpul pembuka ketika Muktamar XIX menandai keluarnya NU dari Masyumi—sekali gus kelahiran Partai NU sebagai subjek politik yang otonom. Dari simpul awal itu, alur bergerak ke Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan parlemen tempat Partai NU bernegosiasi dalam kabinet-kabinet paruh awal 1950-an, sembari menembus basis-basis organisasi NU di Jawa yang menjadi jangkar sosial-politik santri. Unit analisis merentang pada institusi (Syuriah, Tanfidziyah, badan otonom, kabinet, forum lintas ormas), peristiwa kunci (1952; partisipasi kabinet; krisis 1965–1966), dan aktor (kiai, pengurus partai, elite muda), yang seluruhnya dibaca melalui risalah muktamar, keputusan organisasi, pidato, memoar, arsip media, dan naskah internal.

Desain penelitian dikembangkan sebagai studi kasus terjalin mengenai “arsitektur koalisi NU”. Pada fase 1952–1959 (ujung Demokrasi Liberal), pendekatan kualitatif menekankan pembacaan kasus koalisi lintas partai dan lintas ideologi, sementara elemen life history dipakai untuk menautkan pengalaman tokoh dengan keputusan kelembagaan. Memasuki 1959–1965 (awal Demokrasi Terpimpin pasca Dekret 5 Juli 1959), unsur grounded secara terbatas dipakai untuk membiarkan kategori analitis seperti aktor, forum, dan instrumen koalisi muncul dari pola yang berulang dalam dokumen dan pemberitaan. Pada tahap-tahap transisi, strategi campuran digunakan untuk mengontraskan temuan-teksual dengan indikator numerik sederhana.

Operasionalisasi konsep “arsitektur koalisi” dilakukan melalui tiga gugus kategori: struktur (posisi, jabatan, kanal formal seperti kementerian dan fraksi), proses (pola negosiasi, aliansi, veto, kompromi, serta momen krisis), dan wacana (justifikasi keagamaan, bahasa moral, argumen kebangsaan). Ketiganya dipetakan ke dalam pertanyaan kerja: siapa yang bernegosiasi, melalui forum apa, dengan alat tawar apa, dalam konteks wacana apa, dan dengan luaran kebijakan apa. Skema inilah yang mengarahkan pembacaan setiap dokumen, pidato, dan berita, sehingga data tak hanya dikumpulkan, tetapi juga diposisikan dalam relasi yang koheren.

Pengumpulan sumber mengikuti ritme perubahan politik. Untuk 1952–1957, fokus diarahkan pada dokumen organisasi dan arsip media yang merekam perombakan kanal negosiasi santri setelah pemisahan dari Masyumi. Periode 1959–1963 menekankan penelusuran pidato, notulen, dan keputusan yang terkait penetrasi konsepsi Nasakom; materi visual dan audio—foto arsip, selebaran, rekaman pidato bila tersedia—digunakan untuk menangkap bahasa simbolik koalisi. Menjelang 1965–1966, wawancara insani dengan sejarawan, pengurus atau aktivis NU, serta saksi hidup atau keluarga tokoh ditambahkan dan selalu diuji silang dengan

sumber primer-sekunder yang otoritatif; penelusuran digital dipakai sebagai pintu masuk, sementara media sosial hanya berfungsi sebagai penunjuk arah, bukan bukti final.

Teknik kritik sumber dilakukan bertahap. Autentikasi memeriksa asal-usul, kondisi fisik, dan status publikasi dokumen; kredibilitas mengecek keberpihakan penulis, tujuan penerbitan, dan konteks sensor; representativitas menilai kelaziman atau kekhasan temuan dalam lanskap yang lebih luas; dan koherensi menautkan temuan lintas-sumber agar membentuk narasi sebab-akibat yang meyakinkan. Pada korpus pers dan pidato, pembacaan konten dipadukan dengan analisis retorika untuk memisahkan antara strategi persuasi dan substansi kebijakan.

Prosedur pengodean data kualitatif dilakukan secara bertingkat. Pengodean awal menangkap istilah kunci seperti kementerian agama, koalisi, Nasakom, waliyyul amri, serta istilah teknis parlementer. Pengodean fokus menyusun kategori aksi seperti negosiasi, dukungan bersyarat, oposisi selektif, dan rem moral. Pengodean tematik kemudian merakit tema lintas-kasus: perlindungan sektor agama-pendidikan, kalkulasi stabilitas, dan respons terhadap komunisme. Seluruh kode dipelihara dalam buku kode yang memuat definisi kerja, contoh, dan aturan inklusi-eksklusi untuk menjaga konsistensi.

Triangulasi dilakukan pada tiga level. Triangulasi sumber menggabungkan dokumen organisasi, arsip media, memoar, dan wawancara. Triangulasi metode menyandingkan kritik dokumen, analisis wacana, dan pemetaan kuantitatif ringan. Triangulasi peneliti—melalui pembacaan sejawat atau konsultasi ahli—dipakai pada bagian-bagian yang rawan bias interpretasi. Selain itu, catatan jejak audit analitis disusun untuk merekam keputusan pengodean, revisi kategori, dan alasan pemilihan bukti kunci, sehingga proses inferensi dapat ditelusuri ulang.

Komponen kuantitatif ringan dipakai sebagai penopang, bukan pengganti, pembacaan kualitatif. Peta waktu koalisi, frekuensi partisipasi kabinet, sebaran jabatan, dan intensitas rujukan istilah kunci dalam korpus pers dihitung secara sederhana untuk memeriksa konsistensi arah temuan. Representasi visual seperti garis waktu dan matriks aktor-forum-keluaran kebijakan membantu menguji apakah narasi kasus selaras dengan pola empirik yang lebih luas.

Pertimbangan etika menempati posisi sentral terutama pada wawancara. Persetujuan partisipan dimintakan secara jelas, kerahasiaan identitas dapat diberlakukan atas permintaan, dan kutipan langsung dikonfirmasi untuk mencegah misrepresentasi. Pada bagian yang menyentuh kekerasan politik 1965–1966, peneliti memperlakukan narasi trauma dengan kehati-hatian, memisahkan kesaksian pengalaman dengan klaim faktual, serta mendahulukan sumber primer resmi saat menyimpulkan tanggung jawab aktor.

Keterbatasan penelitian diakui sejak mula. Ketersediaan dan akses arsip tidak selalu merata, sejumlah dokumen mungkin terkurasi oleh rezim yang berkuasa, dan memori lisan rentan seleksi. Untuk itu, strategi mitigasi meliputi perluasan korpus lintas-media, penggunaan beberapa edisi sumber, pengujian silang dengan data kuantitatif ringan, dan pernyataan eksplisit tentang derajat kepastian kesimpulan. Hasil akhirnya diharapkan bukan hanya menggambarkan urutan peristiwa, melainkan memetakan bagaimana Partai NU membangun dan menyesuaikan arsitektur koalisi bersama Presiden Soekarno dalam kurun 1952–1966.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Partai NU dan Presiden Soekarno 1952-1966

Keluarnya Nahdlatul Ulama (NU) dari Masyumi pada Muktamar XIX di Palembang pada 30 April 1952 bukanlah sekadar episode organisatoris, melainkan reposisi epistemik otoritas ulama dalam negara. NU menafsirkan pemunggiran Majelis Syuro di tubuh Masyumi sebagai penyingkiran sumber legitimasi keagamaan dari proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, “keluar” dari Masyumi justru menjadi prasyarat bagi “masuknya” kembali ulama ke ruang negara dengan posisi yang lebih otonom dan berdaulat secara moral (Noer, 1980; Fealy, 1998). Peristiwa ini menandai awal dari babak baru politik santri, ketika ulama tidak lagi menjadi subordinat kaum modernis, tetapi aktor politik yang menentukan arah kebijakan nasional.

Dengan mendirikan Partai NU, komunitas santri bergeser dari “moral constituency” menuju “policy constituency”—dari sekadar basis moral ke entitas yang mampu memengaruhi arah kebijakan. Strategi politik Partai NU bertumpu pada dua kaki: pertama, konsolidasi infrastruktur kepartaian melalui jaringan pesantren, kiai, dan lembaga pendidikan Islam; kedua, diplomasi koalisi yang elastis, terutama untuk mempertahankan akses terhadap kementerian strategis seperti Kementerian Agama yang menjadi simpul kebijakan pendidikan dan sosial keagamaan (Fealy & Barton, 1996). Melalui strategi ini, NU berusaha memastikan bahwa ide-ide keagamaan tradisional dapat diterjemahkan dalam kebijakan publik tanpa kehilangan identitas pesantren.

Dalam masa Demokrasi Parlementer (1950–1959), NU mengadopsi model koalisi fungsional dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan partai-partai lain yang dianggap kompatibel secara ideologis. Sikap ini menunjukkan pragmatisme politik yang diiringi kesadaran kontekstual: aliansi dibentuk bukan karena kesamaan ideologi, tetapi demi efektivitas pemerintahan. Penempatan tokoh-tokoh NU seperti K.H. Masykur sebagai Menteri Agama dan Idham Chalid sebagai Wakil Perdana Menteri dalam kabinet Ali Sastroamidjojo menandai keberhasilan strategi negosiasi santri dalam pemerintahan (Fealy, 1998). Dalam situasi itu, NU tidak hanya memperjuangkan kepentingan umat Islam, tetapi juga mengukuhkan posisi santri sebagai bagian integral dari elite politik nasional.

Namun pijakan politik NU tidak bersandar pada oportunitisme semata. Secara konseptual, NU membangun landasan fiqh-siyasah, yakni pandangan politik berdasarkan hukum Islam yang menempatkan negara sebagai instrumen kemaslahatan. Dalam perspektif ini, dukungan terhadap pemerintah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan adab Ahlussunnah wal-jama‘ah (Dhofier, 1984; Haidar, 1994). Prinsip ini membedakan NU dari sebagian kelompok Islam lain yang menolak keras kompromi dengan kekuasaan. Bagi NU, keterlibatan dalam politik justru merupakan jalan ijtihad untuk memastikan keberlangsungan syariat dalam kerangka negara nasional.

Konsepsi keagamaan yang menjadi dasar hubungan NU dengan Soekarno terumuskan dalam doktrin *waliyyul amri ad-daruri bisy-syaukah*—yakni pengakuan terhadap seorang pemimpin sah dalam keadaan darurat. Soekarno, dalam pandangan ulama NU, memenuhi kriteria ini karena memiliki kekuasaan efektif untuk menjaga keutuhan bangsa. Dukungan terhadap Soekarno dengan demikian bukan bentuk kultus individu, tetapi ekspresi dari fiqh kenegaraan yang menempatkan stabilitas sebagai syarat utama kemaslahatan umat (Haidar,

1994). Selama agama tidak dihapus dari ruang publik, loyalitas kepada negara tetap menjadi kewajiban moral dan politik.

Paradigma “koalisi etis” inilah yang menandai karakter politik NU sepanjang 1950-an. Dalam perdebatan parlemen, fraksi NU bersikap akomodatif terhadap kebijakan pemerintah yang menjaga stabilitas, tetapi tetap kritis terhadap ideologi yang berpotensi merusak nilai Islam, terutama komunisme dan sekularisme ekstrem (Fealy, 1998). NU tidak memposisikan diri sebagai oposisi keras, melainkan sebagai “rem moral” yang mengingatkan pemerintah agar tetap dalam koridor nilai-nilai religius. Dalam konteks ini, politik menjadi instrumen dakwah, bukan arena permusuhan.

Bidang yang paling diawasi NU adalah kebijakan pendidikan dan keagamaan. Melalui kontrol terhadap kurikulum madrasah, kebijakan kementerian agama, serta pengawasan lembaga pendidikan Islam, NU menciptakan hubungan saling menguntungkan antara negara dan masyarakat santri. Negara memperoleh legitimasi sosial melalui dukungan ulama, sementara komunitas pesantren mendapatkan jaminan kebijakan yang mendukung eksistensinya (Fealy & Barton, 1996). Hubungan timbal balik ini menjadi salah satu fondasi stabilitas sosial politik pada masa itu.

Pemilu 1955 menjadi titik kulminasi kekuatan politik NU. Dengan perolehan suara 18,4 persen, NU menempati posisi keempat secara nasional, menegaskan bahwa basis sosial santri merupakan kekuatan elektoral signifikan (Fealy, 1998). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa otoritas ulama dapat ditransformasikan menjadi kekuatan politik tanpa kehilangan akar moralnya. Namun kemenangan ini juga membawa tantangan baru: bagaimana mempertahankan independensi di tengah tarik-menarik kekuasaan yang semakin keras.

Memasuki 1957, situasi politik nasional berubah drastis. Krisis kabinet, meningkatnya ketegangan ideologis, dan gagasan Soekarno tentang “Demokrasi Terpimpin” memaksa NU meninjau ulang strategi koalisinya. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 menciptakan konsolidasi kekuasaan di tangan Soekarno. Dalam konteks inilah, NU kembali melakukan ijihad politik dengan menerima ide Nasakom—akronim dari Nasionalis, Agamis, dan Komunis—sebagai jalan kompromi demi stabilitas negara (Feilard, 1999). Dalam skema ini, NU berfungsi sebagai unsur “Agamis” yang diharapkan menjadi penyeimbang ideologi nasionalis dan komunis.

Namun kebijakan akomodatif itu memunculkan dilema internal. Di satu sisi, Kiai Wahab Chasbullah dan ulama sepuh melihat keterlibatan NU dalam Nasakom sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mencegah perpecahan nasional. Di sisi lain, kelompok muda seperti Subchan Zaenuri, Imron Kadir, dan Mahbub Djunaidi menilai kedekatan dengan Soekarno berpotensi melegitimasi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin menguat (Mahmud, 2021; Feilard, 1999). Ketegangan generasional ini memperlihatkan dinamika internal NU yang sehat: perbedaan pendapat dikelola dalam bingkai loyalitas organisasi dan kesadaran maslahat.

Perbedaan pandangan tersebut menggambarkan dua rasionalitas yang hidup di tubuh NU. Rasionalitas *syar’iyyah* menekankan kedaulatan norma fiqh dan kesetiaan terhadap prinsip keagamaan, sementara rasionalitas *siyasiyyah* menekankan kalkulasi kekuasaan dan konteks realpolitik (Haidar, 1994). Keduanya

bukan saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Dalam praktiknya, NU menggunakan fiqh siyasah untuk mengatur jarak antara loyalitas kepada pemimpin dan tanggung jawab moral terhadap umat.

Meski menghadapi tantangan dari luar dan dalam, NU tetap mempertahankan peran sebagai "penjaga moral negara." Partisipasinya dalam pemerintahan bukan berarti kehilangan idealisme, melainkan strategi agar akses terhadap kebijakan publik tidak terputus. Dalam situasi di mana ideologi komunis semakin ekspansif, kehadiran NU dalam kabinet menjadi penting untuk memastikan nilai-nilai religius tidak tersingkir dari arah pembangunan nasional (Dhofier, 1984). Inilah yang menjadikan koalisi NU dengan Soekarno bersifat "pragmatis-normatif," bukan "populis-ideologis" (Fealy & Barton, 1996).

Namun geometri kekuasaan yang semakin condong kepada PKI pada awal 1960-an mendorong aktivisme santri muda memperkeras sikapnya. Melalui forum parlemen, organisasi pemuda, dan media, mereka menolak total pengaruh ideologi kiri. Ketegangan internal NU justru menjadi mekanisme alarm dini terhadap bahaya dominasi PKI dan penurunan otoritas agama (Feilard, 1999). Ketika Nasakom mulai retak pada pertengahan 1960-an, NU sudah menyiapkan jaringan pesantren dan organisasi pemuda sebagai basis pertahanan ideologis.

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, orientasi politik NU bergeser tajam. Dari koalisi moral dengan Soekarno, NU menjadi koalisi strategis anti-komunis yang mendukung langkah militer di bawah Soeharto. Aktivis muda seperti Subchan Zaenuri dan jaringan Ansor memainkan peran mobilisasi massa, sementara kepemimpinan sepuh seperti Idham Chalid menempuh jalur diplomatik dan institusional (Feilard, 1999; Mahmud, 2021). Dalam konteks transisi ini, NU tidak hanya tampil sebagai kekuatan sosial, tetapi juga agen stabilisasi politik nasional.

Transisi menuju Orde Baru memperlihatkan ambivalensi etis NU. Di satu sisi, loyalitas lama kepada Soekarno sebagai *waliyyul amri* tetap diakui; di sisi lain, kebutuhan untuk memulihkan tata negara dan menumpas komunisme membuat NU harus mengambil jarak politik. NU menempuh jalan tengah: mendukung koreksi politik terhadap Soekarno tanpa mendelegitimasi peran historisnya sebagai pemimpin nasional (Haidar, 1994; Feilard, 1999). Sikap ini menegaskan kematangan politik santri dalam menjaga keseimbangan antara etika agama dan realitas kekuasaan.

Dalam forum-forum politik puncak, tokoh-tokoh NU tampil artikulatif menuntut reformasi sistem pemerintahan dan menekan residu kekuasaan lama yang dianggap membuka ruang bagi komunisme. Dari sinilah lahir konfigurasi politik baru pasca-1966, di mana NU menjadi bagian penting dalam koalisi pendukung Orde Baru (Mahmud, 2021). Walau demikian, warisan hubungan NU-Soekarno tetap membekas sebagai pelajaran penting tentang bagaimana agama, kekuasaan, dan moralitas publik berinteraksi dalam sejarah Indonesia modern.

Jika dirangkum, arsitektur koalisi NU sepanjang 1952–1966 bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, legitimasi keagamaan berbasis fiqh siyasah yang memberikan dasar moral dan teologis bagi partisipasi politik (*waliyyul amri*, maslahat). Kedua, instrumentasi koalisi parlementer dan eksekutif untuk menjaga sektor agama dan pendidikan agar tetap dalam orbit pesantren. Ketiga, mekanisme koreksi internal antara ulama sepuh dan elite muda yang berfungsi sebagai sistem pengaman terhadap deviasi ideologis (Dhofier, 1984; Haidar, 1994;

Fealy, 1998; Feilard, 1999). Melalui tiga pilar inilah, NU mampu mempertahankan eksistensinya sebagai kekuatan keagamaan dan politik yang dinamis.

Hubungan NU dan Soekarno tidak pernah bersifat tunggal. Ia adalah relasi yang kompleks: loyal sekaligus kritis, subordinatif namun adaptif, konservatif sekaligus progresif. Di tangan NU, koalisi politik bukanlah bentuk subordinasi, melainkan medan ijtihad untuk menjaga keberlangsungan tradisi Islam di tubuh negara modern (Fealy & Barton, 1996; Fealy, 1998). Dari sinilah dapat dipahami bahwa politik santri di era Soekarno bukanlah sekadar kompromi kekuasaan, tetapi artikulasi moral dalam bingkai kebangsaan yang berakar pada fiqh, sejarah, dan tanggung jawab sosial Islam.

Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa pemekaran Nahdlatul Ulama (NU) menjadi partai politik pada 1952 bukan sekadar respons organisatoris terhadap ketegangan di tubuh Masyumi, melainkan reposisi strategis otoritas ulama sebagai arsitek koalisi dalam negara. Sejak Palembang 1952, Partai NU merawat dua sumbu praksis koalisi: horizontal (aliansi lintas partai dan lintas ideologi) dan vertikal (tata kelola Syuriah-Tanfidziyah serta badan otonom). Melalui dua sumbu ini, NU menautkan rasionalitas syar'iyyah—berbasis fiqh siyasah, konsep maslahat, dan doktrin waliyyul amri ad-daruri bisy-syaukah—with rasionalitas siyasiyyah yang mengelola kalkulasi kekuasaan, akses jabatan, dan leverage kebijakan (Haidar, 1994; Fealy & Barton, 1996; Bush, 2015).

Dalam fase Demokrasi Parlementer, strategi koalisi fungsional NU dengan PNI dan mitra lain memperlihatkan pragmatisme yang tetap bertumpu pada rem moral. NU memanfaatkan kabinet sebagai instrumen kebijakan, terutama di sektor agama dan pendidikan, sembari menjaga jarak dari ideologi yang dianggap mengancam nilai Islam. Pemilu 1955 mengonfirmasi basis elektoral santri dan mengangkat NU dari “moral constituency” menjadi “policy constituency” yang mampu mentransformasikan otoritas kultural menjadi kekuatan kebijakan (Fealy, 1998). Memasuki Demokrasi Terpimpin, penerimaan taktis terhadap Nasakom dibaca sebagai ijtihad untuk mempertahankan stabilitas dan saluran kebijakan; namun dinamika generasional memunculkan mekanisme koreksi internal terhadap eskalasi pengaruh PKI, menandai vitalitas perdebatan di tubuh NU tanpa merusak kohesi organisasi (Feilard, 1999; Mahmud, 2021).

Krisis 1965–1966 menjadi titik balik yang menegaskan elastisitas arsitektur koalisi NU. Dari koalisi etis yang mengakui Soekarno sebagai waliyyul amri, NU bermigrasi menuju koalisi strategis antikomunis yang mendukung konsolidasi politik pasca-G30S. Relasi loyal-kritis terhadap Soekarno bergeser menjadi dukungan korektif terhadap pemulihan tatanan negara, tanpa meniadakan pengakuan atas peran historisnya. Peralihan ini memperlihatkan bahwa arsitektur koalisi NU bekerja sebagai sistem adaptif: mendistribusikan peran antara ulama sepuh dan elite muda, mengaktifkan jaringan pesantren–badan otonom, serta memadukan jalur parlementer, eksekutif, dan mobilisasi sosial (Bruinessen, 1994; Sundhaussen, 1982; Ricklefs, 2008).

Secara teoritik, temuan ini menantang dikotomi lama yang memposisikan NU semata sebagai variabel dependen rezim atau aktor resistensi. NU tampil sebagai perancang koalisi berjenjang yang menggabungkan struktur (posisi, fraksi, kementerian), proses (negosiasi, veto, kompromi, alarm krisis), dan wacana (legitimasi

keagamaan dan kebangsaan) untuk mengamankan kepentingan santri di negara. Secara empirik, tiga lokus—kelahiran Partai NU 1952, partisipasi kabinet 1950-an, dan reposisi 1965–1966—mendemonstrasikan konsistensi rasionalitas koalisi: menjaga akses negara sambil meminimalkan biaya politik bagi basis pesantren (Feith, 1962/2007; Bush, 2015).

Metodologis, pendekatan historis-kualitatif yang menuntut arsip organisasi, pers sezaman, pidato/memoar, dan wawancara, disertai pemetaan kuantitatif ringan, memungkinkan rekonstruksi yang dapat ditelusuri dan diuji silang (Gottschalk, 1969; Howell & Prevenier, 2001). Meski keterbatasan akses arsip dan seleksi memori lisan diakui, triangulasi sumber-metode-peneliti memperkuat validitas inferensi. Dengan demikian, politik santri pada akhir era Soekarno bukanlah kompromi tanpa kompas, melainkan ijihad koalisi yang etis-pragmatis untuk memastikan keberlangsungan tradisi Islam dalam negara modern—sebuah pelajaran kunci bagi studi Islam–negara dan koalisi partai berbasis agama di Indonesia (Fealy & Barton, 1996; Ricklefs, 2008).

Daftar Pustaka

- Boland, B. J. (1971). *The struggle of Islam in modern Indonesia*. Martinus Nijhoff.
- Bruinessen, M. van. (1994). NU: Tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru. LKiS.
- Bush, R. (2015). Nahdlatul Ulama and the struggle for power within Islam and politics in Indonesia. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Dhofier, Z. (1984). Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kiai. LP3ES.
- Fealy, G. (1998). Ijihad politik ulama: Sejarah NU 1952–1967. LKiS.
- Fealy, G., & Barton, G. (1996). Nahdlatul Ulama, traditional Islam and modernity in Indonesia. Monash Asia Institute.
- Feillard, A. (1999). NU vis-à-vis the state: A study of the political identity of Nahdlatul Ulama. LKiS.
- Feith, H. (2007). The decline of constitutional democracy in Indonesia. Equinox Publishing. (Karya asli terbit 1962).
- Gottschalk, L. (1969). *Understanding history: A primer of historical method*. Alfred A. Knopf.
- Haidar, M. A. (1994). [Judul buku tentang fiqh siyasah/NU di Indonesia]. [Penerbit].
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Howell, M., & Prevenier, W. (2001). *From reliable sources: An introduction to historical methods*. Cornell University Press.
- Lev, D. S. (1966). *The transition to guided democracy: Indonesian politics, 1957–1959*. Cornell Modern Indonesia Project.
- Mahmud, A. (2021). [Judul karya tentang Subchan/NU 1960-an]. [Penerbit].
- Noer, D. (1987). Partai Islam di pentas nasional 1945–1965. Grafiti Pers.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Sundhaussen, U. (1982). *The road to power: Indonesian military politics 1945–1967*. Oxford University Press.

van Klinken, G. (2007). Communal violence and democratization in Indonesia: Small town wars. Routledge.